



Ekspresi Warganet Merespons PPKM Darurat: Studi Kritis terhadap Komunikasi Publik Gubernur Bali

I Komang Agus Widiantara*

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/8/2022

Revised : 9/11/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 93 - 104

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali menuai kritik. Bali menjadi salah satu wilayah yang terdampak terhadap kebijakan tersebut. Hal tersebut bisa dicermati dari ekspresi pengguna media sosial di berbagai forum. Ekspresi tersebut juga bisa disimpulkan dari postingan para warganet yang bersifat kritis dan sarkas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ekspresi dan sentimen publik pada grup Facebook Parlemen Medsos Bali terhadap penerapan PPKM Darurat di Pulau Dewata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi netnografi (etnografi virtual). dengan menganalisa konten-konten dan literatur relevan terkait topik pada grup facebook Parlemen Medsos Bali. Hasil dari penelitian ini adalah ekspresi Warganet diantaranya digambarkan melalui beragam meme, ilustrasi, pernyataan sarkas hingga sindiran kritis yang menjadi dialog para Warganet. Ekspresi Warganet juga melahirkan persepsi dalam merespons PPKM Darurat. Pertama, Warganet kritis dan juga antipati dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali selama PPKM Darurat. Kedua, Gubernur Bali dinilai gagal suarakan aspirasi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Ketiga, Gubernur Bali dinilai konyol dengan imbauannya mengenai masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol arak campur kopi yang viral di media sosial.

Kata Kunci : Warganet; PPKM Darurat; Komunikasi Publik.

ABSTRACT

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) in Java and Bali has drawn criticism. Bali is one of the areas affected by this policy. This can be observed from the expressions of social media users in various forums. This expression can also be inferred from the posts of netizens who are critical and sarcastic. This study aims to examine public expressions and sentiments on the Facebook group of the Bali Medsos Parliament on the implementation of Emergency PPKM on the Island of the Gods. The method used in this research is descriptive qualitative with the netnographic study approach (virtual ethnography). by analyzing relevant content and literature related to the topic on the Bali Medsos Parliament facebook group. The results of this study are that Warganet's expressions are depicted through various memes, illustrations, sarcastic statements to critical satire that become the dialogue of Warganet. Warganet's expressions also gave birth to perceptions in responding to Emergency PPKM. First, Warganet is critical and antipathetic to the policies of the Bali Provincial Government during Emergency PPKM. Second, the Governor of Bali is considered to have failed to voice the aspirations of the community in handling the Covid-19 pandemic. Third, the Governor of Bali is considered ridiculous for his call for people to consume alcoholic beverages mixed with coffee which has gone viral on social media.

Keywords : Netizen; PPKM Emergency; Public Communication.

@ 2022 Jurnal Riset Public Relations Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Indonesia mencatatkan rekor tertinggi kematian *Covid-19* pada 1 Juli 2021 sebesar 504 orang meninggal dunia. Angka kematian harian tersebut terbesar setelah paparan pandemi terjadi pada 28 Januari 2021 yang mencapai 476 meninggal dunia perhari. Tren kematian akibat pandemi yang belum menunjukkan penurunan signifikan mendorong pemerintah merancang berbagai program langkah strategis. Pemerintah Pusat memutuskan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali.

Hal serupa juga berimbas pada sektor pariwisata di Bali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPSPB), tahun 2019 jumlah kedatangan wisatawan asing ke Bali masih normal yaitu 6.275.210 wisatawan. Namun, seiring dengan penyebaran *Covid-19* ke Bali pada tahun 2020, pariwisata Bali mulai merasakan dampaknya yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali, yaitu sebanyak 1.069.473 orang (BPSPB, 2021). Angka kunjungan wisatawan ke Bali merosot drastis hingga 82,96%. Sepinya wisatawan ini berimplikasi pada penutupan bisnis-bisnis pariwisata di Bali yang akan mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp 9,7 triliun setiap bulannya (BPSPB, 2021; Pemerintah Provinsi Bali, 04/09/2020).

Contohnya, selama lima bulan antara Februari-Juni 2020, Bali mengalami kerugian sebanyak Rp 48,5 triliun (BBC News Indonesia, 30/09/2021). Selain itu, *Covid-19* juga telah mengakibatkan 71.313 sampai dengan 76.200 orang kehilangan pekerjaan baik yang dirumahkan sementara maupun pemutusan hubungan kerja (BBC News Indonesia, 30/07/2020; PPB, 04/09/2020). Kebijakan PPKM dan dampak turunannya membuat masyarakat Bali bereaksi. Respons terhadap kebijakan selama PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali dikeluhkan masyarakat luas akan membuat sektor ekonomi lumpuh. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Bali dalam menanggulangi efek *Covid-19* sepenuhnya mengacu dan tunduk kepada instruksi Pemerintah Pusat. Meski demikian, masyarakat khususnya pengguna internet (warganet) mengkritik keras kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten, berlebihan dan minim solusi dalam dalam penerapan PPKM berlangsung. Warganet menilai Pemerintah sangat plin-plan, tanpa sosialisasi matang dalam menerapkan kebijakan publik dan kurang jelasnya informasi dari provinsi hingga kabupaten/kota di Bali.

Inilah yang mencerminkan Pemerintah provinsi Bali gagal dalam melakukan komunikasi krisis selama pandemi berlangsung. Pada saat krisis terjadi, komunikasi menjadi aktivitas penting dalam manajemen krisis. Komunikasi yang tidak efektif akan berdampak pada terciptanya hubungan yang tidak baik antar organisasi dengan publiknya dalam hal ini antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat (warganet). Krisis sebagai proses disampaikan G. Harrison (2005). Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang mempengaruhi suatu organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya (Fearn-Banks, 2007; Kriyantono, 2015). Krisis tidak dapat dihindari, tapi kemungkinan masih bisa dicegah. Untuk mengantisipasi dan menghindari dari dampak negatif dari krisis diperlukan manajemen krisis untuk mempersiapkan berbagai strategi dan taktik apa yang akan dilakukan untuk menangani suatu krisis tersebut. Menurut G. Harisson (2005), komunikasi krisis (*communication crisis*) adalah aktivitas *Public Relations* dalam menyediakan pesan-pesan yang relevan dengan situasi krisis dan membuka saluran komunikasi terbuka (Kriyantono, 2015). Komunikasi krisis secara luas sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis (W. . Coombs, 2010).

Selama pandemi berlangsung, forum ini rajin mengkritisi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mengokestrasi penanggulangan krisis yang berkepanjangan pandemi *Covid-19*. Terlebih berdampak langsung terhadap pariwisata di Bali. Forum yang telah diikuti 17,4 ribu *followers* tersebut menarik simpati warganet untuk melakukan diskusi virtual karena informasi tersebut terbuka bagi siapapun. Topik-topik yang dibahas melalui aktivitas *sharing* dan *comment* terbilang cair, menarik dan terkadang menggelitik karena relevan dengan keluhan masyarakat Bali. Beberapa pernyataan Gubernur Bali selama Pandemi khususnya PPKM darurat tidak luput dari sorotan Parlemen Medsos Bali. Gubernur Bali yang dicap kontroversial karena kurang komunikatif, terkesan birokratis dan kurang humanis selama mengeluarkan kebijakan kepada publik di Bali.

Misalnya saja anjuran Gubernur Bali Wayan Koster untuk meminum arak campur kopi. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan virtual pengarahan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kepada para kades dan lurah, Senin (12/7/2021). "Terus semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh sontoloyo, tidak boleh malas-malasan, harus rajin, harus semangat, harus tekun. Kalau kurang semangat, lemas,

langsung minum kopi tanpa gula pakai arak, supaya jadi semangat.” (news.detik.com) Informasi sejenis ini ramai diperbincangkan warganet di Parlemen Medsos Bali. Pernyataan kontroversial Wayan Koster selaku Pemimpin di Bali dinilai kurang logis, tidak mendidik, konyol dan memalukan. Percakapan-percakapan daring di Parlemen Medsos Bali sebenarnya menggambarkan betapa geramnya publik dengan kebijakan Gubernur Bali.

Tidak berhenti pada anjuran arak campur kopi untuk penambah imun selama pandemi, berbagai kebijakan Wayan Koster tidak lepas mendapatkan kritikan keras dari warganet. Seperti Penataan Pura Agung Besakih, pembangunan jalan tol dan mega proyek pusat pembangunan kebudayaan di Kabupaten Klungkung yang bernilai triliunan rupiah. Agenda pembangunan selama pandemi bukannya menuai pujian malah sebaliknya. Warganet menilai, Gubernur Bali Wayan Koster tidak peka dengan kondisi Bali yang mengalami krisis hebat di tengah pusat *Covid-19*. Warganet menyalah Wayan Koster mengkapitalisasi kondisi pandemi dengan melanjutkan berbagai proyek strategis monumental untuk kepentingan dan ambisi politik semata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana ekspresi serta sentimen warganet dalam merespon kebijakan Gubernur Bali dalam PPKM Darurat. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena selain menguraikan respons warganet atas kebijakan publik khususnya dalam komunikasi publik, forum Parlemen Medsos Bali yang dijadikan wadah untuk membangun opini publik juga menjadi agenda politik sang pendiri (pengelola), Gede Pasek Suardika yang memiliki sikap berseberangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dibawah pimpinan Wayan Koster.

Subadra (2021) dalam *Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali* menguraikan kebijakan pemerintah tentang budaya pariwisata dan mitigasi pandemi di Bali dilakukan selama pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian menemukan peraturan daerah tentang wisata budaya adalah diubah selama wabah *Covid-19* untuk memperkuat penggunaan budaya lokal untuk pariwisata yang mengadaptasi kebijakan pariwisata nasional dan internasional untuk memimpin suatu pariwisata yang lebih bertanggung jawab yang menunjuk budaya asli lokal Bali Tri Hita Karana dan Sad Kerthi sebagai basis pengembangan wisata budaya di Bali; dan yang lebih penting, pemerintah Bali mengeluarkan kebijakan dan segera melakukan tindakan untuk membuka kembali pariwisata di Bali yang ditutup total turun karena pandemi. Kebijakan-kebijakan ini ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat lokal dan tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Bali.

Nurhajah dan Mutiarin (2020) dalam *Mencermati Komunikasi Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia* menguraikan lebih jauh pola komunikasi yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Pusat dalam merespons Pandemi. Pemerintah dinilai belum cekatan dalam merespons pandemi dan dampaknya kepada publik melalui komunikasi krisis. Padahal prinsip penting dalam komunikasi krisis yakni membangun komunikasi partisipatif yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memproduksi dan mengelola informasi *Covid-19* ini secara mandiri. Komunikasi partisipatif ini juga dapat mengurangi hoaks yang sering beredar di masyarakat saat *Covid-19* ini. Melalui komunikasi partisipatif ini masyarakat lebih berperan dalam mengelola informasi *Covid-19* ini sehingga masyarakat lebih cerdas, berdaya dan tidak mudah percaya hoaks.

Monggilo (2020) dalam *Komunikasi Publik Pemerintah Masa COVID-19: Telaah Kritis Sistem Informasi Publik* mengkaji tata kelola dan praktik komunikasi publik pemerintah masa *COVID-19*. Analisis dibangun berdasarkan periodisasi dan kronologi sejumlah peristiwa penting sejak pengumuman kasus positif pertama *COVID-19*. Pembahasan dalam kajian tersebut mulai dari sengkabutnya komunikasi publik pemerintah di masa-masa awal pandemi, peluncuran situs web resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagai sumber informasi satu pintu, hingga inovasi layanan komunikasi digital lainnya. Uraian kronologis ini dianalisis dengan kerangka komunikasi publik era krisis, dan diakhiri reflektif. Meskipun literatur sebelumnya memiliki benang merah yang sama terkait komunikasi publik dan komunikasi krisis dalam merespons dampak pandemi. Namun penelitian yang dilakukan memfokuskan pada ekspresi publik (warganet) di Bali dalam merespons komunikasi publik Gubernur Bali di ruang digital khususnya melalui Grup Medos Parlemen Bali. Literatur sebelumnya akan memperkaya tinjauan narasi komunikasi publik pemerintah daerah sesuai dengan substansi penelitian ini. Namun berfokus pada ekspresi dan reaksi warga yang aktif di media sosial (warganet).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi netnografi (etnografi virtual). Metode ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan partisipan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu (John, 2013). Netnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif, bentuk terbaru dari penelitian etnografi, yang mempelajari kebiasaan unik dari berbagai jenis komunitas dan budaya yang terjadi dalam komunikasi termediasi secara *online* (Kozinets, 2019). Komunitas *online* diartikan sebagai sekelompok individu yang berbagi interaksi sosial dan ikatan sosial yang terjalin dalam komunikasi termediasi komputer atau ruang virtual. Netnografi digunakan untuk mempelajari serta memahami dunia *cyber* bahkan perilaku komunitas *online*, mendalami kehidupan komunitas virtual tersebut dari perspektif pelaku (Handini, 2018; Samatan, N., Fitriani, D. R., Ohorela, N. R., Gunadarma, U., & Raya, 2017)

Objek kajian etnografi adalah warganet dengan aktivitas dan kehidupan mereka di dunia virtual. Dalam hal ini konten-konten merupakan hasil interaksi warganet di grup facebook Parlemen Medsos Bali. Subyek dari penelitian ini adalah warganet yang memberikan komentar terhadap informasi yang beredar di Grup Facebook Parlemen Medsos Bali. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencermati dan mengamati komentar, *like*, dan *share* dari Grup Parlemen Medsos Bali. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa konten dan respon yang diberikan oleh warganet kurang lebih selama 3 bulan dari bulan Juli-September 2021 pada grup facebook Parlemen Medsos Bali.

C. Hasil dan Pembahasan

Komunitas Virtual dan Ekspresi Warganet di Parlemen Medsos Bali

Parlemen Medsos Bali menjadi ruang interaktif bagi komunitas warga (netizen) di Bali untuk menyikapi berbagai kebijakan publik. Ruang ini dijadikan untuk berdialog, berkomunikasi hingga membangun gagasan terkait isu-isu penting yang menyangkut masyarakat luas sekaligus respon dari program ataupun kebijakan Pemerintah Bali. Seperti halnya komunitas nyata, menjadi sebuah kehidupan yang secara inderawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, di mana hubungan sosial sesama anggotanya dibangun melalui penginderaan (Nurudin, 2017). Komunitas secara nyata (realitas) dicirikan oleh adanya kelompok orang yang menempati suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas secara nyata, hidup secara berdampingan dalam kurun waktu tertentu dan saling berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama, serta memiliki sejumlah aturan maupun hukum yang mengatur pola kehidupan di komunitas tersebut. Untuk tetap tergabung dengan komunitasnya, individu harus melakukan kompromi dan akomodasi perilakunya agar sesuai dengan aturan, norma, dan etika yang berlaku di komunitas tersebut.

Sama halnya dengan komunitas virtual seperti Parlemen Medsos Bali yang sudah berdiri sejak April 2020 ini. Komunitas maya ini menjadi kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun juga dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas (Bungin, 2007). Komunitas virtual menggunakan model kehidupan yang sama seperti komunitas realitas, tetapi terbentuk dan terhubung melalui interaksi jasa jaringan *internet* sebagai sebuah tatanan dunia (maya). Dasar berkumpulnya bukan lingkungan, seperti pada komunitas realitas, melainkan kesamaan minat, kebutuhan, dan kepentingan. Individu dengan ketertarikan, kebutuhan, atau kepentingan yang sama pada satu hal tertentu dapat berkumpul dan bergabung dalam suatu komunitas virtual sebagai aktivitas yang terjadi di dunia virtual. Komunitas virtual ‘mengizinkan’ anggotanya untuk mengunjungi komunitas tanpa batasan waktu dan tempat. Secara prinsip, Parlemen Medsos Bali sebagai komunitas virtual merupakan hasil dari jejaring sosial (*social networking*), yaitu mekanisme untuk membentuk komunitas atau grup virtual melalui hubungan yang dibentuk bukan hanya dengan lingkungan dekat, melainkan juga dengan mereka yang secara fisik berjauhan, bahkan dengan mereka yang, secara tradisional, tidak memungkinkan untuk bertemu.

Jaringan sosial (*social network*) memberi peluang untuk masuk pada jaringan yang lebih luas, jauh melampaui jaringan sosial dunia nyata yang sekarang dimiliki. Anggota komunitas dapat dipertemukan oleh kesamaan minat, kepentingan, maupun riwayat kebersamaan. Mereka kemudian saling berbagi “peristiwa saat

ini” seakan-akan berada pada waktu dan lokasi yang sama, walaupun sebenarnya berada terpisah-pisah. Tanpa mengenal secara personal, bahkan tanpa perlu bertemu secara. Hal ini menjadi ciri khas komunitas virtual khususnya Parlemen Medsos Bali. Meskipun pemilik akun satu dengan yang lainnya tidak memiliki ikatan secara kolektif atau saling kenal, interaksi terjadi dengan alami. Baik yang memberikan respon positif maupun negatif. Ruang maya tersebut menjadi interaksi dinamis khususnya dalam mengekspresikan ide, gagasan, opini, dan pandangan-pandangan selama PPKM Darurat yang berlangsung di Bali.

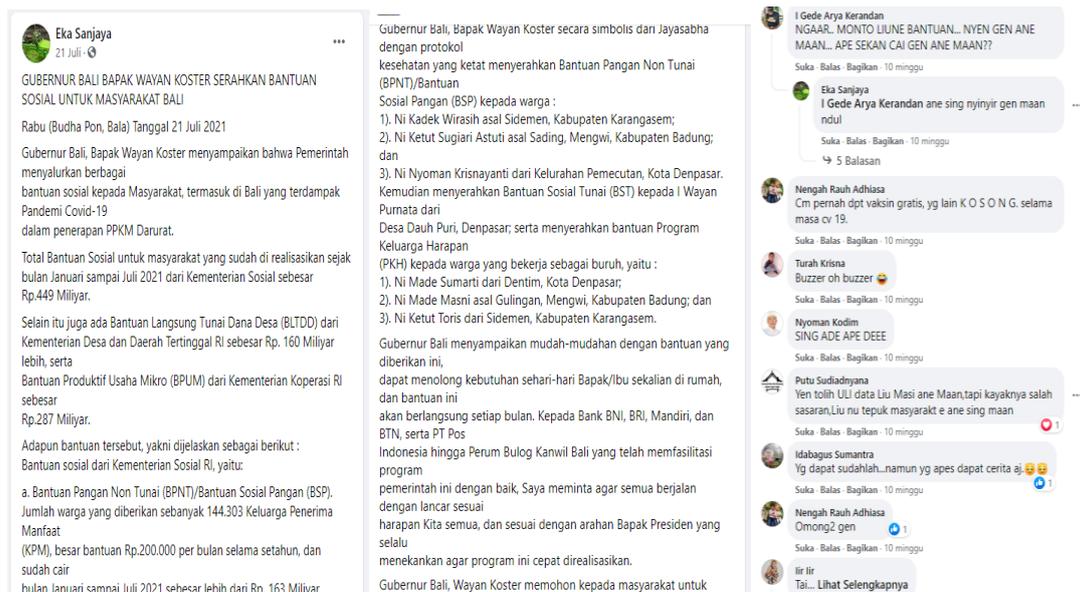


Gambar 1. Halaman Grup Parlemen Medsos Bali

Ekspresi warganet dalam merespons kebijakan PPKM Darurat di Bali sejalan dengan pemikiran Henry Jenkins dalam Wardani (2018) bahwa *Participatory culture* mengambil peran dan berpartisipasi secara aktif dalam produksi, diseminasi dan interpretasi budaya yang dilakukan individu atau anggota dari suatu komunitas. Partisipasi disini yang dimaksud adalah partisipasi dalam membangun interaksi yang merupakan budaya itu sendiri khususnya dalam forum-forum virtual yang diggal oleh siapapun di media sosial atas dasar motivasi, tujuan dan agenda tertentu. Bentuk budaya partisipasi warganet di Parlemen Medsos Bali sejalan dengan ruang lingkup Jenkins dalam mendefinisikan elemen-elemen dari partisipasi budaya di ruang virtual mulai dari afiliasi, ekspresi, kolaborasi pemecahan masalah dan akses informasi (akselerasi) Partisipasi budaya ini akan menjadi pisau analisis dalam menarasikan dan mengeksplorasi ekspresi partisipasi budaya yang dibangun pada Forum Parlemen Medsos Bali di platform Facebook atas respon Komunikasi Publik yang dilakukan Gubernur Bali selama PPKM Darurat berlangsung.

Sarkasme, Kritik dan Antipati dengan Kebijakan Pemerintah

Selama PPKM Darurat Jawa-Bali yang ditetapkan sejak 3 Juli 2021 narasi penolakan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut riuh rendah di mana-mana. Termasuk warganet yang mengekspresikan kegelisahan mereka di media sosial. Berdasarkan pengamatan konten yang di-post selama periode penelitian, respon warganet yang terlihat melalui fitur *like*, *comment*, dan *share* pada grup Facebook Parlemen Medsos Bali. Aktivitas dan interaksi yang dibangun melalui forum virtual itu didominasi oleh pernyataan atau opini pribadi netizen, membagikan informasi media online dan merespons informasi terkait PPKM Darurat di kolom komentar.



Gambar 2. Warganet mem-posting pidato Gubernur Bali Wayan Koster yang ditanggapi dengan sarkas terkait penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat di Bali.

Salah satu postingan yang mendapatkan tanggapan warganet di grup Parlemen Medsos Bali adalah akun Eka Sanjaya berjudul Gubernur Bali Bapak Wayan Koster Serahkan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Bali. Informasi yang disebarluaskan terkait salinan sambutan Gubernur Bali wayan Koster dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 dalam penerapan PPKM Darurat. Dalam informasi yang di-*share* dipaparkan bahwa total bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah direalisasikan sejak bulan Januari sampai Juli 2021 dari Kementerian Sosial sebesar Rp449 Miliar. Selain itu, ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI sebesar Rp160 Miliar lebih, serta Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi RI sebesar Rp287 Miliar. Gubernur Bali dalam informasi tersebut secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut dari Rumah jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Provinsi Bali memohon kepada masyarakat untuk menerima dan memaklumi kebijakan pemerintah melaksanakan PPKM Darurat yang memberatkan masyarakat.

Setidaknya ada 33 akun mengomentari informasi tersebut dan 20 menyukai postingan yang sudah tayang sejak 21 Juli 2021 tersebut. Meskipun tanpa foto, narasi yang disampaikan dalam postingan tersebut memberikan pesan penting bahwa Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali melakukan berbagai upaya dalam menangani dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah melalui distribusi bantuan tersebut sebagai tanda dan simbol bahwa negara hadir dalam kondisi krisis berkepanjangan yang dirasakan masyarakat yang terdampak. Meski demikian, bukan berarti sentimen positif yang diperoleh melainkan sebaliknya. Netizen dalam Parlemen Medsos Bali menyikapi miring bantuan yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Narasi yang bertujuan membangun citra positif Pemprov Bali malah blunder, sarkasme, menuai kritik hingga memunculkan sikap antipati warganet.

Hal tersebut datang dari komentar @Nengah Rauh Adhiasa yang menyikapi postingan Eka Sanjaya. Menurutnya bantuan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak sepenuhnya betul terealisasi di masyarakat. Pihaknya pada forum tersebut mengakui tidak pernah mendapatkan bantuan selama Covid-19 selain Vaksinasi. Selaian netizen tersebut, akun lainnya juga menanggapi serupa bahwa apa yang diberitakan tidaklah sepenuhnya benar. Distribusi bantuan selama pandemi disoroti tebang pilih oleh petugas-petugas di tingkat desa dalam melakukan pendataan. Sehingga bisa dipastikan para penerima bantuan sosial tidak merata. Pernyataan sarkasme juga datang dari pemilik akun @IdabagusSumantra yang mengatakan "Yang dapat sudahlah, namun yang apes dapat cerita aja,." Dari pengamatan peneliti, khususnya selama PPKM Darurat Pemerintah Provinsi Bali memang intens melakukan terobosan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Bali yang terdampak khususnya para pekerja pariwisata yang terkena PHK. Misalnya dengan menggandeng pihak swasta ataupun

BUMD/BUMN dalam menyalurkan sebuah bantuan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun demikian upaya baik tersebut tidak diimbangi dengan respons positif warganet khususnya di parlemen Medsos Bali. Sentimen negatif lebih mendominasi postingan maupun komentar-komentar netizen yang aktif.



Gambar 3. postingan terkait penghargaan yang diterima Gubernur Bali.

Narasi sarkasme dan kritik pada Grup Parlemen Medsos Bali tidak sulit ditemukan selama PPKM Darurat Jawa-Bali berlangsung. Gede Pasek Suardika sebagai admin dalam forum tersebut turut memberikan pujian yang sangat sarkas. Ia mengajak para anggota dalam forum yang ia buat untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran yang telah dilakukan oleh Gubernur Bali dalam penanganan PPKM mikro yang dinilai terbaik melalui tautan informasi berita daring. Ada 54 komentar dan 70 like. Ekspresi sarkasme para warganet bisa tercermin dari postingan pemilik akun berikut ini.

Dek Genz: *“mekite kedek takut dosa.”*

Van Gawang: *“pak yuaaan ane mahn penghargaan, masyakate be oyang liunan stresss, uyak himbauan”*

Bli Yan: *“Sing pocol tiang milih Bapak niki memang jenius penuh inovasi tiada hentinya”*

Wayan Sugiarta: *“Jeg mekite misuh. Aruuuhhh”*

Tison Lauwyer: *Segseg bungut ne aji penghargaan to wake bo sing perduli pepekaem*

Gede. J. V. Phusaka: *“Memangnya ppkm itu perlombaan dan kompetisi ya? Sampai ada penghargaanannya.”*

Made Tamong: *“Pak Yan memang is the best pokoknya.. Lanjutkan 3 periode pak Yan..Bali bangga punya gubener seperti pak Yan.. Ternyata kopi tanpa gula + arak memang top cer... Salut bener bener salut tiang pak Yan..”*

Ekspresi warganet yang sebagian besar menggunakan bahasa Bali jika dimaknai secara substansi sarat akan pernyataan sarkas, kritik dan sikap antipati terhadap kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster. Imbauan-imbauan yang dibuat dengan berbagai surat edaran, dipandang hanyalah sekedar mencari perhatian kepada Pemerintah Pusat meskipun kondisi rakyat sedang paceklik. Prestasi-prestasi tersebut dikejar hanyalah untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi politik di tengah pandemi *Covid-19*.

Gubernur Bali Gagal Suarakan Aspirasi Masyarakat

Matinya sektor pariwisata di Bali, berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Terlebih penetapan PPKM darurat yang berlangsung di Jawa dan Bali. Perpanjangan PPKM pun terus menuai kritik oleh warganet di Parlemen Medsos Bali. Kebijakan baik berupa imbauan maupun pengumuman tentang perpanjangan PPKM seolah tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat. Sorotan warganet mengkritisi kegagalan pemerintah di Bali yang belum maksimal menyuarakan aspirasi mengenai penolakan PPKM Darurat. Postingan Gede Pasek Suardika menuai respon hingga 70 komentar dan 73 like selebihnya di-*share* sebanyak 3 akun. Perdebatan

dalam kolom komentar sangat alot mengkritisi perubahan istilah dari PPKM Darurat menjadi *level* 1-4. Warganet menilai perubahan istilah tersebut tidak serta merta melonggarkan aktivitas masyarakat.

Akun Nyoman Ariantha menilai bahwa dalam merespons gejolak publik selama PPKM Darurat, desakan publik yang luas bagik dilakukan di lapangan maupun secara virtual membuat seorang pengambil kebijakan memperhalus aturan dengan menggunakan dan mengganti istilah. Pemerintah dinilai cukup jeli dan *briliant* dalam manajemen krisis panjang pandemi dengan menggunakan istilah *level* pada wilayah tertentu. Sehingga dengan harapan psikologi masyarakat bisa dikendalikan. Semakin besar *level* di setiap daerah hal tersebut menunjukkan bahwa warga pada daerah tersebut belum menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Tentu konsekuensinya adalah aktivitas dan produktivitas warga diredam.



Gambar 4. Postingan berita terkait perubahan istilah dalam PPKM darurat menjadi level.

Pemilik akun lainnya yang memberikan respon postingan tersebut adalah Widhiarta. Perubahan nama yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengubah status PPKM Darurat menjadi tidak berarti bagi masyarakat kelas menengah bawah yang menjerit dalam mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan menurutnya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama tidak berpihak kepada publik secara luas sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang selama ini dilontarkan di ruang publik dan menjadi *spirit* Pancasila

Level kemelaratan, kesulitan, kebingungan mencari nafkah, tanggung jawab kepada keluarga keluarga anak istri dll itu levelnya berapa?? Anda membuat *level* tentang Wabah, tapi tidak memikirkan tentang dampak *level* yang diterapkan dan bagaimana mereka bertahan di situasi segala *level*nya. Tolong, pikirkan dulu yang kecil-kecil yang kebingungan di bawah. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia itu apa benar atau cuma hapalan bagi mereka yang di Atas?.

Sangat dilematis memang menerapkan aturan di tengah masa krisis. Di saat rakyat berjuang mencari nafkah, pembatasan-pembatasan yang dilakukan justru mengungkung ketidakberdayaan masyarakat. Selain dari keluarga yang memiliki latarbelakang kurang mampu, kendala dalam mencukupi kebutuhan hidup juga dirasakan oleh kelas menengah yang mulai kehilangan pekerjaan dan menyusutnya tabungan akibat tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi. Rilis mingguan perkembangan level yang dilakukan oleh Pemerintah dari pencermatan peneliti dari berbagai media menunjukkan sentimen negatif. Terlebih warganet di Parlemen Medsos Bali sudah mulai abai dan apatis dengan seruan serta imbauan-imbauan dalam protokol kesehatan. Berbagai pemilik akun yang peneliti cermati lebih mementingkan kebutuhan hidup ketimbang harus melakoni protokol sesuai anjuran pemerintah.

Ajakan Minum Kopi Campur Arak Dinilai Konyol

Gubernur Bali Wayan Koster selama Pandemi *Covid-19* kerap dikritik secara terbuka oleh warganet di parlemen Medsos Bali. Selain pernyataan yang dinilai kontroversial juga kurang masuk akal dan logis. Selama PPKM Darurat Jawa -Bali berlangsung Wayan Koster menuai kritikan keras dari netizen. Bahkan di berbagai forum media sosial, jarang ditemukan kebijakan Pimpinan Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali tersebut mendapat pujian secara alami. Pada Senin (12/7/2021) Wayan Koster melakukan pertemuan virtual pengarahan PPKM darurat kepada para kades dan lurah. Pada forum virtual itu, ia berkeinginan agar arak Bali bisa dijual secara legal, terlebih Bali sebagai daerah pariwisata yang memang membutuhkan minuman arak Bali bagi wisatawan. Bahkan Koster telah meregulasi keberadaan minuman tersebut dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Di tengah Pandemi ini, ia mengajak masyarakat untuk mengonsumsi arak agar imun tubuh makin baik.

Melalui para kepala desa atau perbekel, ia menganjurkan minum kopi dicampur arak. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi *COVID-19* dan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Terus semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh sontoloyo, tidak boleh malas-malasan, harus rajin, harus semangat, harus tekun. Kalau kurang semangat, lemas, langsung minum kopi tanpa gula pakai arak, supaya jadi semangat."

Koster mengaku sering mencampur kopi tanpa gula dengan arak untuk menjaga kesehatan. Selain arak, kopi dapat dicampur tuak untuk menjaga kesehatan.

Padahal masyarakat sudah mengetahui bahwa arak adalah minuman alkohol tradisional di Pulau Dewata. Minuman ini dibuat dari nira dan diproses secara tradisional oleh petani arak. Yang dipersoalkan warganet di Parlemen Medsos Bali bukanlah konsumsi arak boleh atau tidak. Namun anjuran disampaikan gubernur Bali di cap konyol dan kurang rasional. Terlebih di saat pandemi, komunikasi publik yang dibangun melalui dialog virtual dengan perangkat desa tersebut kurang mendidik. Berikut ini ekspresi warganet mengenai reaksi atas anjuran mengonsumsi kopi dan arak secara bersamaan.

Gd Alit Wibawa: "Kalo memang sehat, tolong info kan k pusat... Biar negara sehat... Omong gen"

Andika: "Be je to seken mkade sehat ngudyang bin orein mvaksin...artinya teori ilmiahnya mnjadikan imun tubuh kuat ..tanpa perlu vaksin atopun obat....Jani stop men keto PPKM darurat.."

Nengah Rauh Adhiasa: "Apakah kopi campur arak sudah lolos Uji Kelayakan bila dilihat dari segi Ilmu Kesehatan? Publikasikan dulu hasilnya."

Sangtu Mayun: "Ketimbang meli vaksin, kan luungan meli arak,bs lbih ngirit pis rakyat dadi proyek vaksin."



Gambar 5. Cuplikan video parodi anjuran Gubernur Bali agar warga mengonsumsi minuman kopi dan arak di Grup Parlemen Medsos Bali

Pernyataan-pernyataan mengandung sarkas dan kritis dari warganet di Parlemen Medsos Bali sebenarnya menggambarkan kegelisahan masyarakat akan komunikasi publik yang dibangun oleh para pejabat kurang peka dengan kondisi krisis. Warganet mempertanyakan rasionalitas arahan Gubernur Bali untuk menganjurkan mengkonsumsi arak campur kopi sebagai asupan untuk menangkal *Covid-19*. Apalagi cuplikan video yang beredar mengenai arahan tersebut viral di media sosial dan mendapatkan atensi luas, khususnya dari kalangan media massa nasional. Komunikasi yang kurang elegan dan sulit di counter oleh Gubernur Bali tersebut pada akhirnya menjadi bulan-bulanan Wayan Koster. Imbauan unik tersebut dengan liar menyebar ke berbagai platform dan menjadi konsumsi publik tanpa adanya ruang edukasi yang jelas. Yang pada akhirnya pernyataan mengkonsumsi kopi dan gula di tengah-tengah pandemi menjadi jargon hingga banyol dari berbagai obrolan perbincangan warganet sampai di warung kopi. Bahkan tidak sedikit seniman Bali dan para konten kreator mengkritik anjuran tersebut menjadi sebuah lagu dan video parodi yang mengocok perut.

Pembangunan Proyek Prestisius Tuai Kritik

Warganet di Grup Parlemen Medsos Bali dibuat bingung dengan berbagai kebijakan yang dilontarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster selama PPKM Darurat. Komunikasi publik yang tidak elegan ditangkap sinis dan terjadi blunder. Di tengah warga berjuang untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan di saat krisis proyek-proyek prestisius Pemprov Bali tetap berjalan. Bahkan dengan terang benderang Wayan Koster melalui tim komunikasi ataupun Humas di Pemprov mempublikasikan kebijakan yang dijalankan di tengah pandemi. Seperti pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, Penataan kawasan suci Pura Besakih, Jalan Toll hingga pembangunan bandara di Bali Utara.

Namun yang paling mencolok direspon oleh Parlemen Medsos Bali yakni rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Megaprojek yang dibangun di tengah pandemi Covid 19 ini pun masih tetap berjalan dengan nilai proyek Rp2,5 Triliun. Mega proyek ini memang sejak awal rencana, selalu digaungkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Sehingga tidak bisa lagi dibendung meskipun pada akhirnya ambisi pembangunan proyek tersebut dengan melalui hutang pada Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ini rencananya berdiri di atas lahan seluas 320 hektar dan akan mengandung penjabaran dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana untuk menuju Bali Era Baru. Pengaplikasiannya di antaranya melalui hutan buatan, taman, fasilitas seni, pameran, kuliner UMKM hingga waduk dan pelabuhan bahkan hingga menjadikan kawasan ini merupakan salah satu kawasan lengkap yang mengimplementasikan filosofi dari visi pembangunan Bali tersebut.



Gambar 6: Postingan Gede pasek Suardika terkait proyek Pusat Kebudayaan Bali yang digagas

Gubernur Bali tetap berjalan meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19

Seperti pemimpin Bali sebelumnya yang melahirkan proyek monumental, Wayan Koster juga mengikuti jejak para pendahulu penguasa di Bali. Sayangnya momentum tersebut tidaklah tetap. Agenda pembangunan proyek dengan dana besar tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak empati dengan kondisi rakyat yang melarat. Ekspresi warganet merespon agenda proyek tersebut disambut sinis dan kritis. Netizen atas nama Wayan Gama Gama yang merespon postingan Gede Pasek Suardika dengan cara menilai Gubernur Bali lebih mementingkan pembangunan fisik yang monumental dibandingkan memperhatikan kondisi rakyatnya yang kelaparan. Agenda pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sebagai warisan kepemimpinan pemimpin hari ini dengan motivasi sebagai sejarah dikemudian hari. Di lain hal kebijakan yang dilakukan dinilai ngawur dan tidak berpihak kepada kesulitan rakyat. Wayan Koster dinilai terlalu berambisi untuk membangun monumen yang dipandang tidak dibutuhkan secara mendesak selama masa pandemi. Munculnya dugaan dan persepsi-mengenai proyek prestisius yang menjadi target Pemerintah selama Pandemi turut memunculkan beragam bagi Warganet Parlemen Medsos Bali. Tidak sedikit yang mencurigai bahwa proyek yang bernilai jumbo tersebut berpotensi ada cela korupsi dan penyelewengan dana dengan dalih pembangunan. Penilaian tersebut tentu sah-saja mengingat hal serupa seringkali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, tidak segan-segan oknum pejabat melakukan pemotongan dana bantuan sosial seperti terungkapnya berbagai macam kasus yang belakangan mengemuka.

Dukungan Politik Gubernur Bali Terancam

Kepemimpinan Wayan Koster sebagai Gubernur Bali memang menjadi taruhan selama Pandemi Covid-19 berlangsung. Bahkan tidak hanya di Bali, di semua daerah bahkan pemimpin di seluruh dunia mengakui bahwa krisis selama Pandemi menjadi guncangan luar biasa. Tantangan kepemimpinan beserta kebijakan menjadi energi ekstra yang harus dikerahkan dan dipetakan oleh para pemimpinnya. Bagi Warganet Parlemen Medsos Bali, upaya yang dilakukan Gubernur Bali dalam merespons Pandemi dinilai jauh dari harapan masyarakat terutama dalam mengakomodir aspirasi selama PPKM Darurat. Hal ini dipengaruhi oleh komunikasi publik yang selama ini terkesan belum bias, dan kurang peka dengan kondisi psikologi masyarakat.

Berbagai pernyataan kontroversial dan tidak empati disampaikan Gubernur Bali kepada masyarakat luas yang pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Pernyataan-pernyataan dan potongan video mengenai kebijakan yang berpotensi memicu pro-kontra sulit di *counter* di ruang maya khususnya media sosial. Pada akhirnya cibiran dan umpatan yang diterima oleh Gubernur Bali. Hal tersebut tercermin dari postingan Jero Ketut Bikul dalam akun Parlemen Medsos Bali tertanggal 14 Juli 2022 seperti di bawah ini.



Gambar 7. Postingan ajakan warganet terkait sikap politik merespon PPKM Darurat

Postingan tersebut mendapatkan respons berupa komentar 72 dan menyukai 86 akun. Pernyataan salah satu warganet di atas meskipun menggunakan nama anonim, sebagian besar yang memberikan pandangan politik yang sama yakni mendorong Gubernur Bali menyudahi jabatannya sebagai pemimpin karena dipandang tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman selama PPKM berlangsung. Sentimen politik yang muncul di

ruang virtual harus diakui sebagai bentuk ekspresi kegagalan Gubernur Bali membangun Komunikasi Politik dengan warganet di dunia maya. Padahal jika dibandingkan dengan daerah lain misalnya, komunikasi yang efektif menjadi kunci sehingga tidak memunculkan antipati yang berlebihan.

D. Kesimpulan

Ekspresi warganet dalam merespons kebijakan PPKM Darurat di Bali menjadikan Parlemen Medsos Bali sebagai ruang interaktif bagi komunitas warga (netizen) di Bali untuk menyikapi berbagai kebijakan publik. Ruang ini dijadikan untuk berdialog, berkomunikasi dan membangun gagasan-gagasan terkait isu-isu penting yang menyangkut masyarakat luas sekaligus respon dari program atau kebijakan Pemerintah Bali. Kebijakan PPKM Darurat khususnya komunikasi publik yang dilakukan Gubernur Bali mendapat reaksi yang beragam. Mulai dari sikap sarkasme dan kritis oleh Pemerintah dalam penetapan aturan tersebut. Disamping itu juga Warganet menilai Pemprov Bali gagal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat selama Pandemi Covid-19. Harus diakui bahwa Parlemen Medsos Bali sebagai ruang dialog publik yang digagas tokoh di Bali sekaligus sosok yang berseberangan secara politis, membuat dinamika komunikasi dan narasi percakapan di ruang digital diminati oleh para anggota dalam forum virtual tersebut. Kebijakan-kebijakan strategis Pemprov Bali khususnya yang berkaitan dengan fisik dan monumental tidak luput memperoleh kritis keras karena dianggap Pemerintah Bali mengabaikan kondisi masyarakat yang mengalami krisis dan sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika.
- Coombs, W. . (2010). *Parameters for Crisis Communication* (& S. J. H. Coombs (ed.)). Wiley-Blackwell.
- Fearn-Banks, K. (2007). *Crisis Communications: A Casebook Approach*. Lawrence Erlbaum.
- Handini, V. A. (2018). Manifestasi Realitas Simbolik Pada Komunitas Bercadar (Analisis Netnografi Pada Komunitas WhatsApp Bercadar di Wilayah Jabodetabek). *Jurnal Mediakom*, 2(2), 238–249. <https://doi.org/10.35760/mkm.2018.v2i2.1895>
- Harrison, G. (2005). *Communication Strategies as a Basis for Crisis Management Including Use of the Internet as a Delivery Platform*. Georgia State University.
- John, C. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kozinets, R. V. (2019). *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research* (M. Ainsley (ed.); 3E ed.). SAGE.
- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations & Crisis Management (Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif)*. Kencana.
- Monggilo, Z. M. . (2020). *Komunikasi Publik Pemerintah Masa COVID-19: Telaah Kritis Sistem Informasi Publik dalam Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Nurhajah, A. & Mutiarin, D. (2020). *Mencermati Komunikasi Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia dalam Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurudin. (2017). *Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Samatan, N., Fitriani, D. R., Ohorela, N. R., Gunadarma, U., & Raya, J. M. (2017). Konstruksi Pendidikan Virtual: Studi Netnografi Pembelajaran Pada Facebook. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), 686–691. <https://doi.org/10.25008/pknk.v1i1.74>
- Subadra, I. . (2021). Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 1(1), 2.
- Wardani, P. K. (2018). *BUDAYA PARTISIPASI (PARTICIPATORY CULTURE) DI KALANGAN VLOGGER*. Universitas Airlangga.